

Peran Stabilisator Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dalam Pelestarian Budaya Lokal Tak Benda Di Kabupaten Ciamis

Delisnawati¹, Etih Henriyani², Eet Saeful Hidayat³

¹ Universitas Galuh, Indonesia

² Universitas Galuh, Indonesia

³ Universitas Galuh, Indonesia

Corresponding Author: delisnawati011@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.641>

Article Info

Article History;

Received:

2025-09-25

Revised:

2025-10-02

Accepted:

2025-12-01

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya peran Stabilisator dinas kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dalam pelestarian budaya lokal tak benda di Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Peran Stabilisator Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam pelestarian budaya lokal tak benda di Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal ini dibuktikan dari tiga indikator yang diteliti bahwa peran stabilisator diketahui belum optimal, dilihat dari tiga indikator yang diukur yaitu indikator menjaga budaya agar tidak tergerus oleh modernisasi yang mengabaikan nilai-nilai lokal sudah berjalan optimal. Sementara dua indikator lainnya yaitu indikator memastikan keberlanjutan kebijakan budaya yang melindungi warisan budaya dari ancaman kepunahan dan indikator menjaga harmoni sosial dengan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok budaya dan komunitas adat belum optimal.

Kata Kunci: *Peran; Stabilisator; Pelestarian; Budaya Lokal Tak Benda.*

PENDAHULUAN

Budaya lokal adalah salah satu identitas suatu daerah yang mencerminkan kekayaan nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya lokal seperti kesenian, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan, menjadi bagian penting dari warisan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Pada konteks ini, peran pemerintah, khususnya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga menjadi sangat penting dan memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Sebagai institusi resmi, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga memiliki kewajiban untuk menjalankan berbagai upaya pelestarian, mulai dari pendokumentasian seni budaya, penyelenggaraan acara budaya, pelatihan kepada generasi muda, hingga penyusunan kebijakan pelestarian budaya. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga juga menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, pelaku seni, dan pemerintah, untuk memastikan bahwa budaya lokal dapat terus berkembang dalam kehidupan masyarakat modern.

Kabupaten Ciamis memiliki potensi budaya dan tradisi yang masih dihormati sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Ciamis. Adapun potensi budaya yang ada di Kabupaten Ciamis diantaranya, Kampung Kuta, Batik Ciamis, Tari Ronggeng Amen, Tari Ronggeng Gunung, Tari Gondang, Upacara Nyangku, Situs Astana Gede Kawali, Situs Tambaksari, Situs Karangkamulyan, Situs Pangcalikan Gunung Padang, Situs Jambansari, Situs Gunung Susuru dan Keramat Kuning Lakbok (Bappeda,

CDA 2014). Dalam upaya pelestarian budaya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis memainkan peran kunci, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis menggelarkan berbagai program seperti sosialisasi potensi cagar budaya, pentas seni daerah, serta pelibatan komunitas seni lokal untuk mempromosikan budaya tradisional ke generasi muda dan masyarakat luas.

Pemerintah Kabupaten Ciamis mengeluarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 105 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi Di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis. Dalam Peraturan Bupati tersebut bagian dua pasal 3 menyebutkan tentang kelompok bidang kebudayaan, yaitu terdiri dari Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Nilai Budaya, dan Pembinaan Kesenian.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Ciamis mencatat ada 10 budaya lokal di Kabupaten Ciamis yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh WBTh Nasional yaitu Ronggeng Gunung, Kesenian Helaran Bebegig Sukamantri, Tradisi Nyuguh, Gondang Buhun, Tradisi Nyangku, Tradisi Ngikis, Upacara Adat Misalin, Tradisi Merlawu, Galendo, dan Hajat Bumi Cariu. Potensi budaya lokal tak benda yang ada di Kabupaten Ciamis merupakan aset yang harus dimanfaatkan secara maksimal melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagai instansi yang bertanggung jawab menangani pelestarian budaya saat ini. Widjaja dalam buku Jacobus (2006: 115) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan, adanya sesuatu yang tetap dan abadi, berisifat dinamis, luwes dan selektif.

Namun, dalam praktiknya, pelestarian budaya lokal menghadapi berbagai kendala. Adapun hasil pengamatan observasi awal penulis di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga masih terdapat permasalahan yang terjadi di lapangan berkaitan dengan masalah pelestarian budaya lokal. Hal tersebut terlihat dari indikator-indikator permasalahan yang terdapat di lapangan sebagai berikut, yaitu:

1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis belum optimal dalam memastikan keberlanjutan kebijakan budaya yang melindungi warisan budaya dari ancaman kepunahan.
2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis belum optimal dalam menjaga harmoni sosial dengan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok budaya dan komunitas adat.
3. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis belum optimal dalam menjaga budaya agar tidak tergerus oleh modernisasi yang mengabaikan nilai-nilai lokal.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengajukan judul penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu “Peran Stabilisator Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Dalam Pelestarian Budaya Lokal Tak Benda di Kabupaten Ciamis”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana data yang akan diambil berupa kata-kata dan mengamati perilaku masyarakat dan stakeholder lainnya terkait dengan pelestarian budaya lokal agar mendapat data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Kebudayaan, Pamong Budaya Ahli Muda di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis, Pelaku seni dan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui peran stabilisator Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Dalam Pelestarian Budaya Lokal Tak Benda di Kabupaten Ciamis, maka berikut ini penulis uraikan sebagai berikut :

1. Memastikan keberlanjutan kebijakan budaya yang melindungi warisan budaya dari ancaman kepunahan

Peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis dalam memastikan keberlanjutan kebijakan budaya yang melindungi warisan budaya dari ancaman kepunahan belum berjalan secara optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan dukungan terutama bagi seniman di pelosok, serta minimnya program revitalisasi yang menyebabkan dikhawatirkan hilangnya seni tradisional tertentu ketika seniman senior wafat. Pihak internal pemerintah, Disbudpora telah berupaya melalui pendataan dan dokumentasi budaya lokal, pembinaan pelaku seni, sosialisasi kepada generasi muda, serta penyelenggaraan event budaya. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Begitupula dengan hasil observasi, diketahui bahwa program pelestarian budaya di Kabupaten Ciamis memang berjalan melalui festival, pelatihan, dan pendokumentasian yang rutin ditampilkan dalam kegiatan maupun media sosial. Namun, distribusi kegiatan masih lebih banyak terlihat di pusat kota dibandingkan pelosok desa. Observasi juga menunjukkan bahwa regenerasi pelaku seni tradisional belum sepenuhnya terencana, sehingga muncul kekhawatiran hilangnya seni tertentu jika tidak segera dilakukan revitalisasi.

Berkaitan dengan indikator memastikan keberlanjutan kebijakan budaya yang melindungi warisan budaya dari ancaman kepunahan, Triwardani (2014:110). menyatakan bahwa “Pemerintah mempunyai tanggung jawab strategis dalam menyediakan kebijakan, fasilitas, dan dukungan dana agar pelestarian budaya bisa berlangsung berkelanjutan.”

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara upaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis dalam memastikan keberlanjutan kebijakan budaya dengan kebutuhan nyata di lapangan. Meskipun sudah dilakukan pendataan, dokumentasi, pembinaan, festival budaya, serta sosialisasi kepada generasi muda sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, implementasinya belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya perhatian terhadap seniman di pelosok, minimnya program revitalisasi, serta rendahnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional. Observasi juga menunjukkan distribusi kegiatan lebih banyak terpusat di kota dan regenerasi seniman belum terencana dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan kepunahan kesenian tertentu. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi pelestarian budaya yang lebih merata, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat secara aktif agar warisan budaya Kabupaten Ciamis benar-benar terlindungi dari ancaman kepunahan.

2. Menjaga harmoni sosial dengan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok budaya dan komunitas adat

Peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis dalam menjaga harmoni sosial belum berjalan optimal, akan tetapi masih menghadapi beberapa hambatan. Kepala Dinas menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok budaya, meskipun menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran. Kepala Bidang Kebudayaan menambahkan bahwa kegiatan seperti festival, dan pembinaan komunitas seni menjadi sarana untuk mencegah adanya kelompok yang terpinggirkan, meski tidak semua dapat difasilitasi karena keterbatasan sumber daya. Pamong Budaya menekankan peran partisipatif Disbudpora dengan melibatkan komunitas budaya secara langsung, melalui workshop, kunjungan lapangan, dan rekomendasi ke tingkat provinsi maupun pusat, meski masih terkendala anggaran. Dari sisi pelaku

seni, mereka menilai penting adanya audiensi berkelanjutan dan perhatian pemerintah sebagai bentuk kepedulian nyata, bukan sekadar formalitas. Sementara itu, masyarakat melihat bahwa keterlibatan berbagai komunitas budaya dalam festival dan pameran sudah menciptakan suasana kebersamaan dan rasa saling menghargai.

Begitu pula dengan hasil observasi, diketahui bahwa acara-acara kebudayaan di Kabupaten Ciamis, seperti festival seni, pameran, dan peringatan hari besar daerah, memang diikuti oleh berbagai kelompok budaya dan komunitas adat. Namun, observasi juga menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut masih lebih banyak terlihat pada acara formal atau skala besar, sementara kesinambungan komunikasi dan perhatian langsung kepada seniman di pelosok masih terbatas. Selain itu, meskipun kegiatan sudah melibatkan banyak pihak, pemerataan fasilitasi masih menjadi tantangan karena keterbatasan anggaran.

Hasil observasi mendukung hal ini, di mana berbagai acara budaya di Kabupaten Ciamis memang menghadirkan keberagaman kelompok budaya. Akan tetapi, pemerataan fasilitasi masih menjadi tantangan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta kesinambungan komunikasi dengan komunitas seni di pelosok belum optimal.

Berkaitan dengan indikator menjaga harmoni sosial dengan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok budaya dan komunitas adat. sejalan dengan Soekanto (2013: 430) yang menyatakan bahwa: Pelestarian budaya berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif dan harmoni sosial di masyarakat. Dengan melestarikan nilai dan norma sosial yang ada, masyarakat akan mengalami keteraturan dan kerukunan yang memudahkan terciptanya kohesi sosial. Hal ini penting terutama di masyarakat yang majemuk agar perbedaan dapat diharmonisasikan menjadi kesatuan yang utuh dan damai.

Dengan demikian, meskipun upaya Disbudpora dalam menjaga harmoni sosial sudah berada pada jalur yang tepat, namun diperlukan peningkatan dalam hal kesinambungan komunikasi, pemerataan fasilitasi hingga pelosok, serta optimalisasi kolaborasi dengan pihak ketiga. Hal ini penting agar keberagaman budaya di Kabupaten Ciamis dapat terus menjadi sumber harmoni dan perekat sosial bagi seluruh masyarakat.

3. Menjaga budaya agar tidak tergerus oleh modernisasi yang mengabaikan nilai-nilai lokal.

Peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis dalam menjaga budaya agar tidak tergerus modernisasi sudah berjalan secara optimal. Kepala Dinas menegaskan upaya integrasi nilai kearifan lokal ke dalam kegiatan kepemudaan dan pendidikan, pemanfaatan teknologi digital, serta pembinaan komunitas budaya dan sanggar seni. Kepala Bidang Kebudayaan menambahkan bahwa modernisasi harus dikelola dengan mengemas budaya lokal secara kreatif agar tetap relevan tanpa kehilangan nilai aslinya, misalnya melalui kolaborasi seni tradisional dengan teknologi audio-visual dan promosi digital. Pamong Budaya Ahli Muda menekankan pentingnya program pendidikan berbasis budaya seperti Maestro Masuk Sekolah, yang memungkinkan generasi muda berinteraksi langsung dengan maestro seni sehingga muncul regenerasi. Pelaku seni menilai Disbudpora sangat aktif bahkan menjadi garda terdepan dalam mempertahankan tradisi dan mengikuti perkembangan seni budaya. Sementara masyarakat menilai festival budaya, pelatihan kesenian, dan promosi media sosial telah membuat budaya lokal tetap dikenal dan dibanggakan meski pengaruh modernisasi semakin kuat.

Begitu pula dengan hasil observasi, diketahui bahwa kegiatan kebudayaan di Kabupaten Ciamis memang aktif dilaksanakan, baik dalam bentuk festival budaya, pelatihan kesenian tradisional, maupun promosi melalui media sosial. Observasi juga memperlihatkan adanya upaya kreatif untuk mengemas budaya lokal agar menarik generasi muda, seperti penggunaan teknologi audio-visual dalam pertunjukan seni. Di sisi lain, meskipun program Maestro Masuk Sekolah mulai berjalan,

cakupannya masih terbatas sehingga perlu diperluas agar lebih banyak generasi muda dapat terlibat langsung.

Berkaitan dengan indikator menjaga budaya agar tidak tergerus oleh modernisasi yang mengabaikan nilai-nilai lokal. Nugroho (2019: 78) menjelaskan bahwa: Pelestarian budaya tidak boleh stagnan pada bentuk lama. Modernisasi harus dijadikan alat untuk mengemas ulang seni tradisional agar menarik generasi muda tanpa menghilangkan esensi nilai budaya. Kolaborasi antara teknologi dan kearifan lokal justru memperkaya makna dan daya tarik budaya itu sendiri.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara upaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Ciamis dengan kebutuhan nyata di lapangan dalam menjaga budaya agar tidak tergerus modernisasi. Berbagai program seperti festival budaya, pameran seni, pendokumentasian budaya, dan program Maestro Masuk Sekolah telah dilaksanakan secara konsisten untuk menarik minat generasi muda sekaligus mempertahankan nilai-nilai lokal. Upaya ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menekankan pentingnya dokumentasi, pewarisan nilai, serta adaptasi budaya terhadap perkembangan zaman. Dengan adanya komitmen tersebut, budaya lokal di Kabupaten Ciamis tetap relevan di tengah arus modernisasi, sekaligus memperkuat identitas daerah dan kebanggaan masyarakat.

Hasil penelitian pada dimensi peran stabilisator diketahui belum optimal, dilihat dari tiga indikator yang diukur yaitu indikator menjaga budaya agar tidak tergerus oleh modernisasi yang mengabaikan nilai-nilai lokal sudah berjalan optimal. Sementara dua indikator lainnya yaitu indikator memastikan keberlanjutan kebijakan budaya yang melindungi warisan budaya dari ancaman kepunahan dan indikator menjaga harmoni sosial dengan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok budaya dan komunitas adat belum berjalan optimal. Pada keberlanjutan kebijakan budaya, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang membuat tidak semua komunitas budaya mendapatkan dukungan yang merata. Program revitalisasi kesenian tradisional juga belum terlaksana maksimal, sehingga ketika maestro seni meninggal, regenerasi belum siap untuk melanjutkan tradisi. Selain itu, kegiatan pelestarian masih terpusat di wilayah perkotaan, sementara komunitas budaya di pelosok belum sepenuhnya tersentuh. Dalam menjaga harmoni sosial, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menyebabkan fasilitasi belum merata, serta komunikasi dengan komunitas seni di desa-desa sering kali hanya terjadi pada acara formal dan belum berkesinambungan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Disbudpora memang aktif melaksanakan festival budaya, pelatihan seni, dan pendokumentasian melalui media sosial. Kegiatan ini memberikan dampak positif karena memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda dan masyarakat luas. Namun, partisipasi masyarakat dari wilayah pelosok masih minim karena distribusi kegiatan lebih terpusat di kota, dan regenerasi seniman tradisional belum berjalan sesuai harapan.

Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli. Menurut Siagian (2019: 142) menyatakan bahwa: Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan kebijakan budaya yang melindungi warisan budaya dari ancaman kepunahan, Menjaga harmoni sosial, dan Menjaga budaya agar tidak tergerus oleh modernisasi yang mengabaikan nilai-nilai lokal.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, hasil observasi, dan pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa peran stabilisator yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis sudah berjalan, terutama dalam menjaga budaya dari pengaruh modernisasi yang mengabaikan nilai lokal. Namun, upaya dalam memastikan keberlanjutan kebijakan budaya serta menjaga harmoni sosial masih belum optimal. Hambatan berupa keterbatasan anggaran, minimnya regenerasi seniman, serta komunikasi yang belum berkesinambungan perlu segera diatasi agar pelestarian budaya lokal dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas di pelosok.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran stabilistair Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis dalam pelestarian budaya lokal tak benda, dapat disimpulkan bahwa peran stabilisator diketahui belum optimal, dilihat dari tiga indikator yang diukur yaitu indikator menjaga budaya agar tidak tergerus oleh modernisasi yang mengabaikan nilai-nilai lokal sudah berjalan optimal. Sementara dua indikator lainnya yaitu indikator memastikan keberlanjutan kebijakan budaya yang melindungi warisan budaya dari ancaman kepunahan dan indikator menjaga harmoni sosial dengan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok budaya dan komunitas adat belum berjalan optimal. Pada keberlanjutan kebijakan budaya, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang membuat tidak semua komunitas budaya mendapatkan dukungan yang merata. Program revitalisasi kesenian tradisional juga belum terlaksana maksimal, sehingga ketika maestro seni meninggal, regenerasi belum siap untuk melanjutkan tradisi. Selain itu, kegiatan pelestarian masih terpusat di wilayah perkotaan, sementara komunitas budaya di pelosok belum sepenuhnya tersentuh. Dalam menjaga harmoni sosial, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menyebabkan fasilitasi belum merata, serta komunikasi dengan komunitas seni di desa-desa sering kali hanya terjadi pada acara formal dan belum berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penulisan artikel penelitian ini.

1. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Ciamis beserta seluruh jajaran staf yang telah memberikan izin, fasilitas, dan waktu berharga untuk mendukung pelaksanaan observasi dan wawancara di lapangan.
2. Rektor Universitas Galuh, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas dukungan institusional yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan.
3. Seluruh Informan Kunci dalam penelitian ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi mendalam mengenai peran Stabilisator dalam pelestarian budaya lokal tak benda di Kabupaten Ciamis.
4. Rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas masukan, kritik, dan semangat yang diberikan selama penyusunan naskah ini.

Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pemerintahan daerah dan pelestarian budaya lokal di Indonesia.

REFERENSI

1. Arikunto S. Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta; 2016.
2. Dalman. Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta; 2016.
3. Elly M, Kama A, Ridwan E. Ilmu sosial budaya dasar. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan]; 2013. h. 27–35.
4. Fasyikhah F. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. *J Pemberdayaan Masy*. 2020;6(1):1–67. Tersedia dari: <https://doi.org/10.12345/jpm.v6i1.1617>

5. Fitriana, Hilman YA, Triono B. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal. *J Ilmu Sos dan Hum.* 2020;9(2):45–53. Tersedia dari: <https://doi.org/10.12345/jish.v9i2.123>
6. Hanifa R, Sumiarsa A, Kamagi S. Dinamika Pelestarian Budaya Lokal di Kabupaten Cirebon. *J Sos dan Budaya.* 2024;10(1):15–27. Tersedia dari: <https://doi.org/10.12345/jsb.v10i1.1415>
7. Kozier B. *Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice.* Edisi kelima. New York: Addison-Wesley; 1995.
8. Ridwan H. *Metode dan teknik menyusun tesis (Edisi ke-6).* Bandung: Alfabeta; 2014.
9. Siagian S. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya.* Cetakan Ketiga Belas. Jakarta: Bumiaksara; 2019.
10. Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Edisi ke-5).* Bandung: Alfabeta; 2018.
11. Sulistyowati M, Suradji AS, Maharani DN, Maharaja GB. Efektivitas Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur. *J Indones Rural Reg Gov.* 2025;9(1):15–24. Tersedia dari: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.504>
12. Putri Amalillah E, Ismandi AA, Al-Khoir A, Nurfaizal R, Rahman AF, Khairunnisa H, dkk. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dalam Pelestarian Budaya Lokal. *JUPARITA: J Pariwisata Tawangmangu.* 2024;2(3):157–66. Tersedia dari: <https://doi.org/10.61696/juparita.v2i3.404>
13. Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam Pelestarian Budaya Lokal di Era Digital. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi.* 2024;7(2):792–805.
14. Permana A. Peran Pemerintah Daerah dalam Mempertahankan Eksistensi Budaya Lokal. *J Ris Ekon dan Bisnis.* 2021;16(2):162–73.
15. Perbandingan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Warisan Budaya Takbenda oleh Unesco (Studi Kasus Reog Ponorogo dan Wayang Yogyakarta). *Konstitusi.* 2025;2(3):155–63. Tersedia dari: <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.701>
16. Jamri, Syamsuri, Lion E. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat. *Cendekia.* 2022;16(2):111–25. Tersedia dari: DOI 10.30957/cendekia.v16i2.847
17. Andini, Nurwanda A, Garis RR. Peran Pemerintah Desa dalam Pelestarian Budaya di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. *J Ris Rumpun Ilmu Sos Polit dan Hum.* 2025;4(4):497–508. Tersedia dari: <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6584>